

## COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN SMART VILLAGE DESA PANGANDARAN

Nur Ambia Arma  
Universitas Terbuka  
[nurambia@ecampus.ut.ac.id](mailto:nurambia@ecampus.ut.ac.id)

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi collaborative governance yang dilakukan desa Pangandaran dalam mengembangkan smart village, sehingga nantinya dapat mengkonstruksi model kolaborasi berdasarkan teori penta helix. Diharapkan dengan model kolaborasi penta helix, program smart village yang telah dibangun dapat dikembangkan dan ditingkatkan keberhasilannya. Untuk itu, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Karena mencoba untuk menggali secara mendalam berkaitan collaborative governance. Teknik pengumpulan data melalui wawancara terstruktur, observasi, dan juga dokumentasi. Sedangkan analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman dan Saldana diantaranya melalui pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 3 produk yang dilahirkan dalam pengembangan smart village desa Pangandaran, yaitu *smart governance*, *smart society*, dan *smart economy*. Tidak ada konsep collaborative governance penta helix sesuai teori dari Astuti, Warsono, dan Rachim, 2020. Sebab, dalam membangun smart village di desa pangandaran, akademisi tidak dilibatkan. Stakeholder yang terlibat hanya kementerian desa, pemerintah desa Pangandaran, PT. Telkom, masyarakat dan Media Massa.

**Kata Kunci: Collaborative Governance; Smart Village**

### ABSTRACT

*The purpose of this study was to examine the implementation of the policy of the decision at the regional office of the BPN, North Sumatra Province through George Edward III's theory of policy implementation, and to examine the inhibiting factors in implementing the policy. The method used is descriptive qualitative, using data collection techniques through interviews, observations and documentation studies. The data analysis technique uses the Miles, Huberman Saldana interactive model with the stages of data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions.*

*The results of the study found that the Procurement of Bela program at the BPN Regional Office of North Sumatra Province had been carried out well, and it could be said that the procurement officials had succeeded. This can be seen from the communication factor that exists between procurement officials and other stakeholders. The existence of competent human resources and adequate infrastructure resources. There is an attitude of implementers who are highly committed in carrying out their duties, and the activities of procuring goods and services are in accordance with the procedures or procedures drawn up by LKPP. However, there are still obstacles related to the lack of provider participation in the procurement of Bela platform, resulting in a lack of product choices. In addition, there are still obstacles in ordering consumption for the sake of meeting or large events, especially those that are carried out impromptu.*

**Keywords: Policy Implementation, Procurement Bela Program**

## PENDAHULUAN

*Smart Village* menjadi konsep yang viral digaungkan semenjak strategi menuju desa digital menjadi salah satu prioritas arah kebijakan yang terlampir dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Hal ini didasarkan pada perubahan yang terjadi akibat beberapa hal, pertama adanya tuntutan perkembangan revolusi industri 4.0 yang menuntut masyarakat Indonesia harus mampu bersaing secara digital. Kedua, keadaan Indonesia juga terdesak akibat adanya pandemi covid-19 yang menyebabkan terhalangnya masyarakat mendapatkan layanan secara langsung dari pemerintah. Oleh karena itu pemerintah desa pun dituntut untuk dapat meningkatkan kapasitas dalam digitalisasi dan memanfaatkannya untuk melakukan pelayanan secara digital kepada masyarakat (Prayogi et al., 2020). Sedangkan digitalisasi merupakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi melalui alat atau perangkat basis digital seperti smartphone, computer serta pendukung lainnya sehingga mekanisme yang sebelumnya dilakukan secara manual berubah menjadi otomatis (Lindgren et al., 2019).

Beberapa penelitian terdahulu memiliki persamaan pendapat bahwa dalam rangka membangun desa dengan mengatasi kesenjangan baik dari segi ekonomi, akses terhadap Pendidikan, kesehatan dan akses infrastruktur lainnya adalah dengan merubah desa tersebut menjadi pintar (*smart*). *Smart Village* (desa pintar) dapat diwujudkan dengan memberikan peluang masyarakat desa untuk lebih modern dengan penggunaan teknologi dan informasi yang modern secara digital (Canales, C;Holmes, J;Fennel, S;Hurley-Depret, M;Van Gevelt, 2017; Komorowski & Stanny, 2020; Zavratinik et al., 2018). *Smart village* atau desa pintar dengan digitalisasi sebagai upaya sekelompok masyarakat desa untuk melakukan dan memberdayakan segala potensi yang ada di dalam desanya seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, dan faktor produksi melalui teknologi digital yang terhubung dengan jaringan internet guna mengatasi keterbatasan yang terjadi di pedesaan (Zerrer & Sept, 2020).

Salah satu desa yang telah mengimplementasikan konsep *smart village* dalam tata Kelola pemerintahannya adalah desa Pangandaran. Desa ini telah terpilih sebagai salah satu piloting program *Smart Village Nusantara* yang diusung dan dikembangkan oleh Telkom Indonesia (<https://portal.pangandarankab.go.id/berita/opd/desa-pangandaran-menjadi-salohsatu-desa-piloting-smart-village-nusantara>). Beberapa produk yang diluncurkan dari pengembangan *smart village* ini adalah *Smart Government*, *Smart Economy*, dan *Smart Society*. Smart government berkaitan dengan aspek tata Kelola pemerintahan desa, dimana diciptakannya aplikasi yang mendukung pemerintah desa untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efisien dan efektif. Selain itu melakukan pengelolaan desa berbasis data digital, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring maupun evaluasi dari APBDesa, serta terciptanya media komunikasi dan kolaborasi 2 arah antara pemerintah desa dengan masyarakat desa.

Smart economy berkaitan dengan aspek ekonomi desa dan ketahanan pangan desa.

Konsepnya dengan memberikan solusi pemasaran produk unggulan desa melalui BUMDesa berbasis digital yaitu disebut *eCommerce Desa*. Kemudian diciptakannya solusi aplikasi pasar untuk penyediaan jasa antar sesuai dengan ciri ekosistem masing-masing desa. Adanya solusi untuk digitalisasi bagi UMKM melalui *epos* yang terkoneksi dengan perbankan dan pembayaran non-tunai. Terakhir, adanya optimalisasi pendapatan asli desa melalui *eMonev* dari setiap kegiatan desa. Sedangkan untuk smart society berkaitan dengan aspek pemberdayaan masyarakat desa. Pembangunan ini dilakukan melalui beberapa bidang seperti bidang Pendidikan dengan adanya perpustakaan digital desa; bidang keamanan dan kenyamanan warga dengan aplikasi *Panic Button*, *CCTV*, Sistem Peringatan Dini Kebencanaan; dan terakhir pada bidang kesehatan dengan menciptakan *ePuskesmas*, *ePosyandu*, *eBidang* yang terintegrasi sampai ke level kabupaten atau di atasnya (<https://desapangandaran.smartvillagenusantara.id/2020/07/07/hello-world/>).

Fakta ini membuktikan bahwa pengembangan *smart village* tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah desa. Dibutuhkan kolaborasi yang baik antara beberapa stakeholder seperti yang telah dilakukan di desa Pangandaran. Pemerintah desa berkolaborasi dengan PT. Telkom Indonesia untuk mensukseskan pengembangan *smart village*. Tata Kelola pemerintahan yang kolaboratif dapat memfasilitasi pengaruh public terhadap teknologi, data, dan analitik secara “smart” dan sangat dibutuhkan untuk menyertakan public dalam mengambil keputusan berkaitan dengan “smart” infrastruktur yang sedang dikembangkan (Ansell & Gash, 2008).

Literasi collaborative governance dalam pengembangan *smart village* belum banyak ditemukan, sehingga sulit untuk melakukan literature review. Untuk mengatasi masalah ini, penelitian ini mencoba mereview pentingnya kolaborasi dalam pengembangan smart city, sebab smart village merupakan turunan dari konsep smart city. (Bartenberger & Grubmüller-régent, 2014) menganggap bahwa kolaborasi diperlukan dalam konsep *smart city*, dimana kolaborasi tersebut dapat mempengaruhi dalam mengatasi asimetri pengetahuan, memfasilitasi pencarian fakta secara Bersama dan memungkinkan membangun kepercayaan publik. (Mészáros, 2021) menyatakan bahwa *collaborative governance* dalam *smart city* dapat mendukung tata kelola partisipatif khususnya dalam pembuatan kebijakan, masukan warga dan pemangku kepentingan sangat berharga. Sehingga kebijakan yang dijabarkan merupakan hasil konsesus yang luas antara pimpinan pusat, warga dan berbagai pemangku kepentingan. Terakhir mendukung pentingnya collaborative governance dalam pengembangan *smart village* adalah (Roidatua & Purbantara, 2022) yang menyatakan bahwa terwujudnya *smart village* tidak hanya didukung oleh kecanggihan teknologi informasi namun juga perlu kemampuan beradaptasi, memiliki pola interaksi yang baik dan kapasitas masyarakat pedesaan dalam proses transformasi digital melalui pendekatan kolaboratif untuk melibatkan berbagai stakeholder dari lintas sectoral.

Kajian mengenai smart village khususnya dikaitkan dengan collaborative governance masih sangat jarang ditemukan. Hal ini berdasarkan pencarian basis data



## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan pada Desa Pangandaran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu metode yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna dari sejumlah individu atau kelompok orang yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan (Creswell, 2014). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian studi kasus. (Rahardjo, 2017) menyatakan bahwa studi kasus merupakan serangkaian dari kegiatan yang bersifat ilmiah dilakukan secara intensif, mendalam dan terperinci berkaitan terhadap suatu peristiwa, program, ataupun kegiatan yang dilakukan oleh perorangan, sekelompok orang, bahkan Lembaga dan organisasi sebagai sarana memperoleh pengetahuan detail dan mendalam tentang fenomena tersebut.

Informan dalam penelitian ini yaitu Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Sekretaris Desa; Pihak PT. Telkom; Ketua BPD; dan Masyarakat). Teknik pengumpulan data menggunakan teori (Sugiyono, 2019) yaitu dengan melakukan wawancara, melakukan observasi dan juga dengan melakukan pengumpulan dokumen-dokumen seperti RPJMDesa dan lain sebagainya yang relevan. Teknik analisis data yang digunakan adalah model interaktif (Miles & Saldana, 2014), tahapannya antara lain pengumpulan data, mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Smart village merupakan salah satu yang menjadi kebijakan pemerintah Indonesia dalam rangka membangun Indonesia melalui pinggiran (desa-desa). Kebijakan tersebut tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024, dengan arah kebijakan antara lain mengentaskan 10.000 desa tertinggal menjadi desa berkembang; mendorong 5.000 desa berkembang menjadi desa mandiri; revitalisasi 63 kawasan transmigrasi; revitalisasi 40 kawasan perdesaan prioritas nasional; dan mengentaskan 62 daerah tertinggal. Sedangkan strateginya yaitu dengan meningkatkan konektivitas antar wilayah perdesaan; peningkatan usaha pascapanen komoditas pertanian; peningkatan SDM perdesaan; penguatan pariwisata desa; dan digitalisasi perdesaan.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa konsep smart village ini merupakan turunan atau pengimplementasian Smart City di lingkup desa. Sebagai turunan dari konsep, inisiatif dan implementasi Smart City, Smart Village mengadopsipendekatan smart city yang disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan dan permasalahan desa serta menjadi salah satu factor pendukung adanya penggunaan aspek digital dalam kesehariannya. Menurut informan penelitian yang dilakukan dengan PT. Telkom, konsep

smart village pertama diluncurkan oleh PT. Telkom sebelum Kementerian Dea memberikan definisinya. PT. Telkom mendefinisikan smart village sebagai penggunaan digitalisasi di level ekosistem desa dengan tujuannya memunculkan 3 pilar yakni smart governance; smart society; dan smart economy.

1. Smart Governance: merupakan system smart village yang bertujuan untuk meningkatkan proses pelayanan administrasi Pemerintahan Desa dan pelayanan public untuk mewujudkan good governance mulai dari level desa. Jadi dengan kata lain, system smart governance ini hadir untuk memudahkan kegiatan pelayanan desa kepada masyarakat. Smart governance merupakan bentuk pelayanan public yang salah satu fungsinya berkenaan dengan surat-surat keterangan. Dalam program smart governance ini adalah aplikasi “Simple Desa” yang merupakan aplikasi atau system layanan berbasis web dan mobile guna meningkatkan proses interaksi antara Pemerintah dan Masyarakat Desa untuk urusan administrasi, pelayanan dan usaha desa. Sehingga dengan adanya aplikasi ini, masyarakat dapat mengajukan urusan surat keterangan hanya dari rumah saja tanpa harus datang ke kantor desa. Aplikasi kedua adalah “eWarga”, yang merupakan aplikasi sebagai pusat data warga yang dirancang untuk basis data terpadu warga desa. Kelengkapan detail warga desa yang akan terhubung dengan UCM sebagai informasi detail biodata warga desa. Pada aplikasi ini juga akan dilengkapi dengan fasilitas perbandingan data warga dalam bentuk tampilan rekapitulasi dari berbagai basis data warga pada beberapa program yang berjalan. Namun, untuk aplikasi eWarga ini, masih belum dilakukan seutuhnya. Sehingga untuk kategori program smart governance pada desa Pangandaran masih pada aplikasi “Simple Desa”.
2. Smart Society: merupakan system yang berguna untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat desa dengan membawa semangat kolaborasi. Pada aspek atau program smart society ini, rencana pengembangannya terdiri atas beberapa bidang, seperti bidang Pendidikan, akan dibangun “Perpusakaan Digital Desa”. Kemudian pada bidang kesehatan akan dibangun “epuskesmas, ePosyandu, eBidan” yang terintegrasi sampai kepada level kabupaten atau I atasnya. Hal ini dibangun dengan maksud untuk memudahkan masyarakat dalam menangani masalah kesehatan secara cepat. Akan tetapi yang hingga saat ini aplikasi yang eksis masih aplikasi di bidang keamanan dan kenyamanan warga. Keamanan dan kenyamanan ini dianggap paling penting yang harus dihadirkan pada aspek smart society, karena diantaranya terdapat system “Panic Button untuk memperingati masyarakat terhadap adanya bahaya yang mengancam; CCTV untuk memantau keamanan lingkungan masyarakat; serta adanya

System Peringatan Dini Kebencanaan yang berupa sensor lonasor dan sensor untuk banjir”.

3. Smart Economy: merupakan system yang berfungsi untuk meningkatkan roda perekonomian dan pendapatan desa melalui model bisnis partisipatif masyarakat desa serta penggunaan dana desa yang tepat guna.

Collaborative governance pada dasarnya berkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam mengelola atau melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintah khususnya untuk mengatasi masalah dalam publik dengan melibatkan berbagai stakeholder demi tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintah. Oleh karena itu, fokus daripada collaborative governance ada pada kebijakan dan juga masalah public. Sebagaimana O’Leary dan Bingham (Sudarmo, 2015) kolaborasi merupakan konsep yang menggambarkan proses memfasilitasi dan pelaksanaan yang melibatkan multi organisasi untuk memecahkan masalah yang tidak bisa atau tidak dengan mudah dipecahkan oleh sebuah organisasi secara sendirian. Pendapat ini didukung oleh Bardach (Sudarmo, 2015) yang mendefinisikan collaboration sebagai bentuk aktivitas bersama oleh dua institusi atau lebih yang bekerja sama ditujukan untuk meningkatkan “public value” ketimbang bekerja sendiri-sendiri. Bovaird mendefinisikan kolaborasi antara pemerintah dan swasta secara sederhana sebagai pengaturan pekerjaan berdasarkan komitmen timbal balik, melebihi dan di atas yang diatur dalam setiap kontrak antara satu organisasi di sektor publik dengan organisasi di luar sektor publik (Dwiyanto, 2011).

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan pengembangan smart village di desa Pangandaran memiliki keterlibatan beberapa pihak. Akan tetapi belum bisa dipastikan bentuk dari model collaborative governance yang terjalin pada kegiatan pengembangan smart village di desa Pangandaran. Karena ditemukannya smart economy, maka secara langsung pasti akan berkaitan dengan bisnis atau kegiatan perekonomian desa. Sebagaimana (Retno Sunu Astuti, Hardi Warsono, 2020) mengatakan bahwa bentuk konsep penta helix merupakan alat yang sempurna untuk bekerja dalam kondisi kompleksitas dan ekonomi, daripada model inovasi bisnis berbasis konsumen. sehingga menurut mereka, konsep penta helix dianggap berguna dalam menyelesaikan masalah yang multi pihak. Berikut ini analisis terhadap model collaborative governance di Desa Pangandaran:

#### **Pemerintah (Government)**

Dalam penelitian ini pemangku kepentingan dari pemerintah adalah perangkat desa sebagai pemerintah desa yang memiliki tugas dan tanggung jawab mengurus urusannya. Akan tetapi perlu diketahui bahwa peran pemerintah desa hanya sebagai fasilitator, sebab pengembangan smart village ini merupakan program nasional yang diusung oleh

kementerian desa dengan cara realisasinya melalui kerjasama dengan PT. Telkom Indonesia. Sehingga kontrak yang terjadi hanya antara kementerian desa dengan PT. Telkom saja tanpa harus adanya kontrak dengan pemerintah desa Pangandaran. Sebagai daerah yang terpilih mendapatkan hibah pengembangan smart village, desa Pangandaran hanya bertugas dalam mengikuti ketentuan yang diperlukan PT. Telkom untuk mewujudkan smart village. Beberapa kebijakan yang dilakukan pemerintah desa Pangandaran untuk mendukung keberhasilan program kementerian desa ini adalah dengan membantu PT. Telkom dalam mendata wilayah untuk penempatan setiap infrastruktur yang dipasang. Kemudian pemerintah desa memiliki peran dalam mensosialisasikan setiap aplikasi yang diciptakan sebagai penunjang smart village.

### **Dunia Usaha (Industry)**

Kelompok dunia usaha ini merupakan PT. Telkom Indonesia yang memiliki komitmen untuk membangun desa melalui program smart village nusantara. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada poin pertama, PT. Telkom melakukan penandatanganan MoU (*Memorandum of Understanding*) semacam bentuk Kerjasama antara kementerian desa dengan PT. Telkom tu sendiri. Sehingga PT. Telkom memilii tanggung jawab untuk menciptakan etiap indicator smart village yang telah ditentukan seperti membangun jaringan serta infrastruktur pendukung; menciptakan aplikasi-aplikasi mendukung 3 jenis produk smart village (*smart governance, smart society, dan smart economy*).

### **Universitas (University)**

Praktisi akademisi memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan untuk mengembangkan proyek dalam rangka kebijakan. Keahlian dalam pengetahuan masing-masing disiplin ilmu yang dimiliki dapat membantu program pengembangan smart village berjalan lebih baik. Sayangnya, berdasarkan hasil penelitian tidak ada keterlibatan universitas atau perguruan tinggi dalam program smart village di desa Pangandaran. Sebab, menurut kepala desa, desa Pangandaran masih berisifat local yang belum mengetahui begitu banyak soal Kerjasama dengan pihak luar. Sehingga mereka selama ini lebih menunggu datangnya pihak luar ke desa untuk menawarkan kerjasama.

### **Organisasi Non Pemerintah atau Masyarakat Madani**

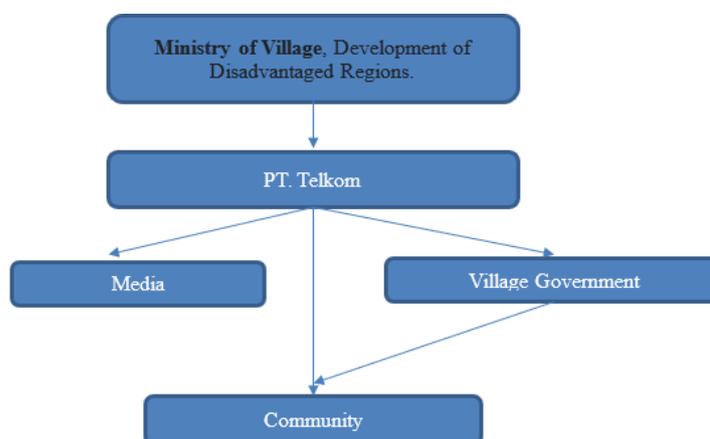
Organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Dalam penelitian ini ditemukan sekitar 900 masyarakat telah terlibat dalam pengembangan smart village di desa pangandaran. Masyarakat ini telah berkontribusi dalam mengupload aplikasi yang telah diciptakan, khususnya yaitu aplikasi simple desa. Pemerintah desa telah mengeluarkan kebijakan untuk mensosialisasikan

program pengembangan smart village kepada masyarakatnya, melalui berkelompok. Mereka merekrut kaum milenial yang tinggal di desa untuk membantu perangkat desa mensosialisasikan aplikasi smart village. Namun masih terdapat kendala, dimana jumlah yang seharusnya pengguna aplikasi setidaknya sebanyak 1500 orang. Kendala ini terjadi karena pandemic covid sehingga kegiatan sosialisasi yang mereka lakukan harus terhenti hingga saat penelitian ini berlangsung.

#### Media Massa

Pelaku dalam kelompok ini adalah semua media, digital maupun bukan. Kepentingan mereka akan didorong oleh apa yang penting diketahui oleh masyarakat luas melalui media yang mereka miliki. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa ada keterkaitan pengembangan smart village terhadap media massa. Media massa memiliki fungsi sebagai penyebarluasan informasi, hingga desa Pangandaran terkenal dengan terpilihnya sebagai salah satu desa yang akan ditransformasi menjadi smart village dimana dananya merupakan hibah dari kementerian desa seperti media massa “merdeka.com”. Akan tetapi, media massa ini tidak berhubungan langsung dengan pemerintah desa, berdasarkan wawancara dengan PT. Telkom, dinyatakan bahwa media massa masih dikontrol oleh Telkom, sebab menurut penilaian PT. Telkom, Pemerintah desa Pangandaran belum siap untuk menghadapi media yang tidak dapat dikontrol.

Berdasarkan analisis implementasi pengembangan smart village di desa Pangandaran terhadap konsep collaborative governance, maka dapat digambarkan sebagai berikut:



Model Collaborative Governance pada Pengembangan Smart Village di Desa Pangandaran.

#### SIMPULAN

Tidak ada konsep collaborative governance sesuai teori dari Astuti, Warsono, dan Rachim, 2020. Sebab, dalam membangun smart village di Desa Pangandaran, akademisi tidak dilibatkan. Stakeholder yang terlibat dalam pengembangan smart village desa Pangandaran adalah: (1) Pihak pemerintah (government) yaitu Kementerian desa sebagai pemilik program smart village di Indonesia sekaligus pemberi dana hibah, dan pemerintah desa sebagai pihak pemerintah level desa yang diberi hibah dan berperan dalam memfasilitasi PT. Telkom dalam mengembangkan smart village; (2) PT. Telkom Indonesia sebagai pihak swasta yang bekerjasama dan dipercaya kementerian desa dalam membangun konektivitas, infrastruktur pendukung Tik, dan pembuatan aplikasi yang mendukung smart village; (3) Masyarakat desa Pangandaran, sebagai pengguna atas produk yang diciptakan dalam smart village yang dikontrol oleh pemerintah desa; (4) Media massa, sebagai pihak yang membantu desa Pangandaran dikenal secara luas melalui penyebaran informasi di media online, dan dikontrol oleh PT. Telkom.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Andari, R. N., & Ella, S. (2021). Digital Talent Management Model for Smart Village in Indonesia. *2021 2nd International Conference on ICT for Rural Development (IC-ICTRuDev)*, 1–6.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Bartenberger, M., & Grubmüller-régent, V. (2014). *The Enabling Effects of Open Government Data on Collaborative Governance in Smart City Contexts*. 6(1), 36–48.
- Canales, C;Holmes, J;Fennel, S;Hurley-Depret, M;Van Gevelt, T. (2017). Rural development through smart villages. *Energy for Sustainable Development*.
- Creswell, J. W. (2014). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dwiyanto, A. (2011). *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Ella, S., & Andari, R. N. (2018). Developing a smart village model for village development in Indonesia. *2018 International Conference on ICT for Smart Society (ICISS)*, 1–6.
- Komorowski, Ł., & Stanny, M. (2020). Smart villages: Where can they happen? *Land*, 9(5). <https://doi.org/10.3390/LAND9050151>
- Lindgren, I., Madsen, C. Ø., Hofmann, S., & Melin, U. (2019). Close encounters of the digital kind: A research agenda for the digitalization of public services. *Government Information Quarterly*, 36(3), 427–436. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.03.002>
- Mészáros, E. L. (2021). Collaborative governance for smart and sustainable cities of the

- 21st century. Case study: The city of Oradea. *European Studies: The Review of European Law, Economics and Politics*, 8(1), 205–221.
- Miles, M. B., & Saldana, A. M. (2014). *Qualitative Data Analysis, A methods Sourcebook Edition 3*. USA: Sage Publications.
- Prayogi, Y. R., Hardiansyah, F. F., Ramadijanti, N., Ahsan, A. S., & Erifani, U. (2020). Penerapan Aplikasi Pelayanan Desa Berbasis Mobile Dengan Konsep Smart Village Di Desa Pegantenan, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan. *SELAPARANG Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 4(1), 646. <https://doi.org/10.31764/jpmb.v4i1.3370>
- Rahardjo, H. M. (2017). *Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Retno Sunu Astuti, Hardi Warsono, A. R. (2020). Sampul Collaborative Governance. *Collaborative Govenance Dalam Perspefkit Publik*, 161.
- Roidatua, M. R., & Purbantara, A. (2022). *Collaborative Governance in Developing Smart Village*. 17. <https://doi.org/10.4108/eai.14-9-2021.2317180>
- Subarsono. (2011). *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sudarmo. (2015). *Menuju model resolusi konflik berbasis governance: memuat pengalaman penelitian lapangan tentang isu pedagang kaki lima dan konflik antar kelompok*. Sebelas Maret University Press.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Zavratnik, V., Kos, A., & Duh, E. S. (2018). Smart villages: Comprehensive review of initiatives and practices. *Sustainability (Switzerland)*, 10(7). <https://doi.org/10.3390/su10072559>
- Zerrer, N., & Sept, A. (2020). Smart villagers as actors of digital social innovation in rural areas. *Urban Planning*, 5(4), 78–88. <https://doi.org/10.17645/up.v5i4.3183>